

**TRANSPARANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN DI PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TAHUN 2018  
(Studi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :**

**JOSHUA TILAS MIPON  
07011281520181**

**Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Indralaya, Ogan Ilir  
Tahun 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**TRANSPARANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN DI PROVINSI SUMATERA**  
**SELATAN TAHUN 2018**  
**(Studi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel)**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik

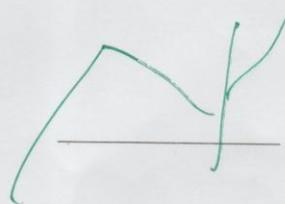
Oleh :

**JOSHUA TILAS MIPON**  
**07011281520181**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2020

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
**NIP.196311061990031001**



**Pembimbing II**

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197705122003121003**



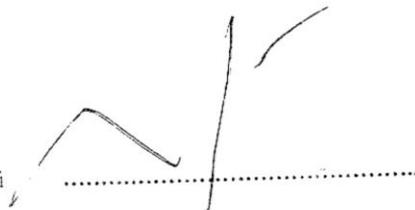
## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Transparansi Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 (Studi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan)*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijayanpada tanggal 25 November 2020.

Inderalaya, 2 Desember 2020

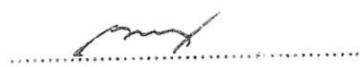
Ketua

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP.196311061990031001



Anggota

2. Sofyan Effendi, S.IP,M.Si  
NIP.197705122003121003
3. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP.196211251989121001
4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP.198108272009121002



Mengetahui,

Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP.196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S. Sos, MPA  
NIP.198108272009121002

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Kesabaran adalah kunci keberhasilan dan kerja keras adalah lambang kesuksesan “(Joshua Tilas mipon)*

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi**

**ini saya persembahkan untuk :**

- Kedua orang tuaku
- Adik- adik yang selalu memberikan dukungan
- Teman-teman seperjuanganku Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2015, dan BEM KM FISIP UNSRI
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Transparansi Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan diProvinsi Sumatera Selatan tahun 2018 ( Studi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel) ”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya .

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa Ucapan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan skripsi yakni kepada :

1. Kedua Orang Tua dan keluarga yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Prof.Dr.Ir. H. Anis Saggaff,MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri.M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof Dr. Alfitri, M.Si selaku wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. Andy Al-Fatih, M.PA selaku wakil Dekan III FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos.,M.Si selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo,S.IP.,M,Si Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasehat dan support serta doa yang terbaik kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri.M.Si Selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan proposal usulan skripsi ini.
7. Bapak Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan proposal usulan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNSRI yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.
9. Bapak Ir. David BJ Siregar, M.Sc selaku kepala Biro Administrasi Pembangunan yang telah memberi arahan dan masukan kepada penulis.
10. Bapak Drs. Sumantri, M.Si Selaku Kepala Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program.
11. Bapak Rahmad Jaya Putra , S.Sos Selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
12. Seluruh karyawan ,Pegawai dan staff FISIP Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian proposal.
13. Temen-temen seperjuang Keluarga besar Ilmu Adminitarasi Publik Angkatan 2015 Indralaya, BEM KM FISIP Kabinet Kolaborasi, Buyung, Styo, Yoga, Iqbal, Betri, Herika, Putri destiansy, Amalia, Arr OM EDHO, Ita ,dan dkk terima kasih atas bantuan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari proposal penelitian ini.

Indralaya, November 2020

Penulis

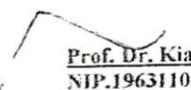
Joshua Tilasmipon

## ABSTRAK

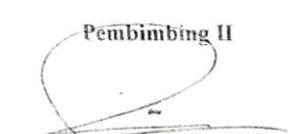
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Transparansi Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018, Studi di biro Administrasi pembangunan sekretariat daerah Provinsi Sumsel. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan variabel Transparansi indikator yang digunakan adalah Penyediaan informasi, menyusun mekanisme pengaduan, Kemudahan akses informasi dan Meningkatkan arus informasi yang diambil dari teori transparansi Lalolo Krina Liona. Penelitian dilaksanakan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan telah berjalan sesuai juknis dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun terdapat adanya temuan yaitu Penyediaan dokumen Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada *website* resmi biro administrasi pembangunan belum sampai pada tahap penyediaan sarana yang berupa *website*, Penyediaan mekanisme pengaduan pada *website* Biro Administrasi Pembangunan sudah sampai tahap tersedia terbukti dengan adanya mekanisme pengaduan LAPOR!-SP4N. Dalam kemudahan akses informasi mengenai laporan realisasi anggaran biro administrasi pembangunan belum terlaksana dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang ahli di bidang *website*, juga biro administrasi pembangunan tidak melakukan kerja sama dengan media massa untuk mempublikasikan dokumen laporan realisasi anggaran. Rekomendasi Biro Administrasi Pembangunan harus mempublikasikan dokumen laporan realisasi anggaran melalui *website* sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Transparansi, Laporan Realisasi Anggaran, Provinsi Sumsel

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP.196311061990031001

Pembimbing II

  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, November 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik  
Universitas Sriwijaya

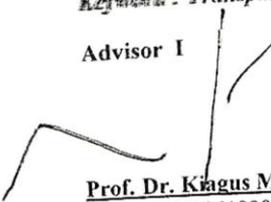
  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP.198108272009121002

## ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the Transparency of Program and Activity Budget Realization Reports in South Sumatra Province in 2018, Study at the Regional Secretariat Development Administration Bureau of South Sumatra Province. The type of this research is descriptive using qualitative research methods. The type of data used is secondary and primary data while the data collection technique uses observation, interview, and documentation techniques. This study uses the Transparency indicator variable used is the provision of information, compiling a complaint mechanism, the ease of access to information and increasing the flow of information taken from the transparency theory of Lalolo Krina Liona. The research was conducted at the Regional Secretariat Development Administration Bureau of South Sumatra Province. The results showed that the Transparency of Program and Activity Budget Realization Reports had been running according to technical guidelines and could be accounted for. However, there are findings, namely the Provision of documents Report on The Realization of Budget Programs and Activities on the official website of the development administration bureau has not reached the stage of providing facilities in the form of websites, The provision of complaint mechanisms on the website of the Bureau of Development Administration has reached the stage of availability proven by the existence of a complaint mechanism LAPOR!-SP4N, In the ease of access to information about the report of budget realization of the bureau of development administration has not been implemented due to lack of human resources experts in the field of websites, also the bureau of development administration does not cooperate with the mass media to publish budget realization report documents. Recommendations of the Development Administration Bureau should publish the budget realization report document through the website so as to realize a transparent and accountable government.

*Keyword : Transparency, Budget Realization Report, South Sumatra Province*

Advisor I

  
Prof. Dr. Khasim Muhammad Sobri, M.Si  
NIP.196311061990031001

Advisor II

  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, November 2020

Chairman of Public Administration Science Department

Faculty of Social Science and Political Science

Sriwijaya University

  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP.198108272009121002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	I
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	Ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Iii
<b>ABSTRAK</b> .....	V
<b>ABSTRACT</b> .....	Vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	X
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	Xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	Xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	Xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Landasan Teori .....	9
B. Anggaran Daerah .....	10
C. Transparansi .....	11
D. Anggaran .....	17
E. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .....	19
F. Teori Transparansi yang Digunakan dalam Penelitian .....	20
G. Penellitian Terdahulu .....	22
H. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	25
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Definis Konsep .....	25
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Jenis dan Sumber Data .....	27

E. Informan Penelitian .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan.....	32
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan.....	33
3. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.....	36
4. Sejarah Singkat Biro Administrasi Pembangunan.....	36
5. Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan .....	37
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	38
B. Analisis dan Pembahasan Transparansi Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Seketariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	45
1. Analisis Penyediaan Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Melalui <i>website</i> .....	46
a. Analisis Ketersediaan Informasi Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan yang jelas pada <i>website</i> .....	50
b. Analisis Ketersediaan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran .....	54
c. Kepatuhan terhadap pelaksanaan mekanisme.....	
2. Analisis Ketersediaan Mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar suap .....	55
a. Analisis Ketersediaan Mekanisme Pengaduan pada <i>website</i> .....	56
b. Analisis Ketersediaan Prosedur Pengaduan .....	58

.....	
3. Analisis Ketersediaan <i>e-mail</i> dan Nomor Telpone untuk komunikasi Antara Masyarakat dan Pemerintah .....	60
4. Analisis Adanya Tanggapan terhadap Pengaduan yang di berikan .....	61
5. Analisis Rentang Waktu dalam Menanggapi Pengaduan .....	63
C. Kemudahan akses informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran Biro Administrasi Pembangunan .....	64
1. Adanya informasi mengenai laporan realisasi Anggaran melalui <i>website</i> .....	64
D. Analisis Kerjasama dengan media massa dalam publikasi dokumen laporan realisasi anggaran .....	66
1. Analisis adanya media massa yang bekerja sama dengan pemerintah dalam mempublikasikan dokumen laporan realisasi anggaran .....	67
2. Analisi adanya bentuk kerjasama dalam publikasi dokumen laporan realisasi anggaran dengan media massa .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72
<b>LAMPIRAN</b> .....	74

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Laporan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan .....	8
2. Penelitian Terdahulu.....	29
3. Fokus Penelitian Transparansi Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan .....	33
4. Laporan Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Web Biro Adminitrasi Pembanguna.....	9
2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	31
4.1 Kantor Gubernur Sumatera Selatan .....	40
4.2 Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	43
4.3 Bagan Biro Administrasi Pembangunan .....	45
4.4 Stuktur Biro Administrasi Pembangunan .....	46
4.5 Hasil Pencarian <i>website</i> Biro Administrasi Pembangunan .....	58
4.6 <i>website</i> Biro Administrasi Pembangunan .....	59
4.7 Struktur Anggaran 2018 .....	59
4.8 Grafik Realisasi Anggaran .....	62
4.9 <i>link</i> Fitur LAPOR! Pada <i>website</i> resmi Pemprov Sumatera Selatan .....	65
4.10 Kolom untuk menuliskan pengaduan di <i>website</i> Lapor! .....	65
4.11 Menu Tentang Lapor pada <i>website</i> resmi LAPOR!-SP4N .....	67
4.12 Wawancara dengan Kepala bagian Evaluasi Pelaporan dan Program ....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi .....	84
2. Kartu Bimbingan dengan Dosen Pembimbing I .....	85
3. Kartu Bimbingan dengan Dosen Pembimbing II .....	86
4. Pedoman Wawancara.....	87
5. Undang – undangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .....	89
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara .....	94

## **DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG**

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPK	: Badan Pengawas Keuangan
KABAG	: Kepala Bagian
KASUBAG	: Kepala Sub Bagian
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PAMPROV	: Pemerintah Provinsi
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TEPRA	: Tim Evaluasi dan Pembangunan Realisasi Anggaran
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peralihan pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi yang dimulai pada pertengahan tahun 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang secara proporsional membawa tanggung jawab yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat, kewenangan tersebut dituangkan dalam peraturan tentang alokasi dan penggunaan sumber daya nasional serta keseimbangan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara spesifik, regulasi tersebut diperjelas dengan berlakunya UU Pemerintah Daerah No. 23/2014 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan persyaratan Indonesia untuk tata pemerintahan yang baik. Seiring dengan peningkatan pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi, pemerintah harus mampu menyediakan produk dan layanan publik.

Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, setiap departemen pengelolaan keuangan negara harus menyampaikan laporan tentang sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, yang mencakup cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pasal 1 UU Perbendaharaan Negara UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan “APBD”, penanggung jawab daerah menyampaikan “Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas APBD di bentuk laporan keuangan berdasarkan nomor PP sebagai PP Rancangan Peraturan Daerah. Nomor 71 Tahun 2010, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo selisih anggaran dan catatan laporan keuangan.

Keuangan juga merupakan studi tentang manajemen publik, dan mendapat perhatian dari peran lembaga pemerintah formal, masyarakat dan organisasi / organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, akses warga negara terhadap informasi keuangan mendukung transparansi pemerintah dalam menyatakan informasi publik itu sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah pada pasal 1 menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Pertimbangkan prinsip keadilan, kesesuaian dan kebaikan untuk masyarakat. Menurut Pasal 1, pemerintah bertanggung jawab menjaga transparansi agar prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan normal.

Transparansi anggaran dapat diartikan sebagai pengungkapan menyeluruh atas semua informasi yang terkait dengan anggaran secara sistematis pada waktu yang tepat. Menurut definisi ini, transparansi anggaran dapat dipahami sebagai proses dimana pemerintah menyediakan, secara terbuka menggunakan dan / atau menyebarkan informasi terkait anggaran selama persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 14/14/2008, setiap informasi publik terbuka dan setiap pengguna informasi publik dapat mengaksesnya. Sebagai informasi untuk konsumsi publik ditegaskan dalam Pasal 12 bahwa lembaga publik wajib mempublikasikan layanan informasi setiap tahun, antara lain: jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang dibutuhkan lembaga publik untuk menyelesaikan setiap permintaan informasi, dan jumlah permintaan informasi yang diberikan. dan ditolak Dan / atau alasan penolakan permintaan. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, selain keterbukaan informasi, publik juga dapat mengontrol dan memantau kinerja, dan lembaga publik dapat berpartisipasi

dalam proses pengambilan keputusan, selain itu juga didorong transparansi dan keterbukaan. Pelayanan pemerintah yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan negara dapat mempercepat terwujudnya open government yang merupakan upaya strategis untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi kepada publik juga menjadi salah satu indikator negara demokrasi, karena publik dapat melaksanakan mekanisme kontrol untuk merespon kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penyelenggaraan nasionalnya.

Selain ketersediaan file, aksesibilitas dan publikasi, transparansi anggaran juga terkait dengan keterbukaan proses. Seseorang yang menggunakan hak untuk berpartisipasi, memantau atau bahkan memberikan nasihat dalam proses perencanaan, diskusi atau pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi, atau proses akuntabilitas. Dalam hal transparansi anggaran, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, baik berupa dokumen maupun proses pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran. Pada saat yang sama, pemerintah berkewajiban untuk membuka dan mengeluarkan dokumen rencana anggaran dan kegiatan kepada publik.

Aspek yang harus transparan pemerintah daerah adalah bahwa APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perangkat kebijakan utama pemerintah daerah sebagai perangkat kebijakan, dan APBD menjadi pusat upaya untuk mengembangkan kapabilitas dan kapabilitas. Efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah harus digunakan sebagai alat untuk menentukan jumlah pendapatan dan belanja, alat untuk pengambilan keputusan dan rencana pembangunan, dan alat untuk otoritas pengeluaran di masa depan. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi untuk semua kegiatan di setiap unit kerja.

Realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang memberikan informasi yang sama mengenai realisasi anggaran dan realisasi entitas pelapor dalam periode waktu tertentu. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus / defisit, dan pembiayaan entitas pelapor, dan membandingkan setiap item dengan anggaran. Informasi ini berguna untuk melaporkan penilaian pengguna tentang alokasi sumber daya ekonomi, pelaporan akuntabilitas entitas, dan keputusan kepatuhan anggaran. Periode pelaporan laporan realisasi anggaran minimal setahun sekali. Dalam beberapa kasus, tanggal pelaporan entitas akan berubah, dan periode tampilan laporan realisasi anggaran tahunan mungkin lebih lama atau lebih pendek dari satu tahun, entitas akan mengungkapkan informasi tersebut. Penyusunan laporan keuangan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses yang mencatat dan meringkas data transaksi.

Sebuah media dimana pemerintah daerah menjelaskan kinerja keuangannya kepada publik. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan pemerintah daerah berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan dan mengungkapkan Nama Badan Pemerintah Daerah, kewajaran dan mutunya. Seperti yang dinyatakan dalam pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi pemerintah, salah satu kriterianya adalah laporan harus disampaikan dengan andal. Reliabilitas di sini berarti tidak ada konsep yang menyesatkan dan kesalahan substantif yang dapat dinyatakan dan diverifikasi secara jujur. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Dalam mencapai transparansi, laporan realisasi anggaran memiliki beberapa faktor transparansi yang dapat dijadikan tolak ukur. Krina (2003: 15) menjelaskan faktor-faktor yang mengukur transparansi sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang jelas;
2. Akses mudah ke informasi;
3. Membentuk mekanisme pengaduan; dan
4. Meningkatkan pertukaran informasi melalui kerjasama dengan media massa.

Jika aspek-aspek tersebut dapat tercapai maka transparansi dalam laporan realisasi anggaran dapat dengan mudah tercapai.

PERDA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Sumatera Selatan

Dalam Administrasi Pembangunan terdapat laporan pelaksanaan anggaran pelaksanaan program kegiatan selama beberapa tahun, yaitu:

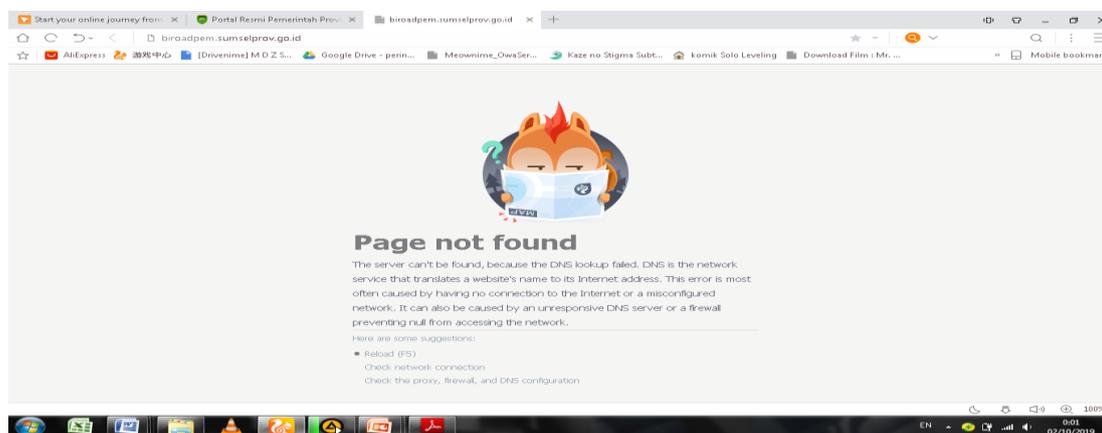
**Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan**

Tahun.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi %	
			keuangan	Fisik
2016	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. 3. Program Kedinasan Pelaksanaan Pembangunan.	1,866,032,963	90.90	100
2017	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. 3. Program Kedinasan Pelaksanaan Pembangunan.	1,341,352,700	98.78	100

2018	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	2,557,430,900	92.14	99.21
------	--	---------------	-------	-------

*Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa pada tahun 2016 dan 2017 anggaran Administrasi Pembangunan mengalami penurunan, dan pada tahun 2018 anggaran mengalami peningkatan yang signifikan karena adanya peningkatan sekitar Rp. Pada tahun 2018 terdapat 1.216.078.200 rencana yang berbeda dengan dua tahun sebelumnya yaitu rencana peningkatan kapasitas sumber daya perangkat. Terlihat dari tabel di atas bahwa penyerapan anggaran dan realisasi yang sebenarnya telah terserap seluruhnya, namun pada kenyataannya terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan tenaga pendukung dengan ketrampilan IT / komputer dan sertifikat barang dan jasa, serta keterbatasan fasilitas dan jasa. Infrastruktur untuk mendukung tugas pokok Badan Pembangunan.



**Gambar 1.1 Web Biro Administrasi Pembangunan**

*Sumber : Website resmi Pemprov sumsel*

Dapat juga dilihat dari Gambar 1 di atas bahwa dokumen mengenai laporan realisasi anggaran yang direncanakan dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan tidak dipublikasikan di website sehingga laporan realisasi anggaran telah transparan. tapi belum

terealisasi sepenuhnya. Terwujudnya transparansi dapat mewujudkan hak masyarakat untuk mengetahui untuk memperoleh dan memperoleh informasi atas kebijakan, rencana dan kegiatan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupannya. Ini bisa dilihat di website Development Administration yang tidak berjalan. Sementara itu terkait poin keempat transparansi Krina yaitu melalui kerjasama dengan media massa untuk menambah informasi, sehingga website yang masih belum berjalan dapat menghambat akses publik terhadap informasi yang merupakan aspek penting untuk mencapai transparansi itu sendiri. Administrasi Pembangunan juga memberikan informasi yang jelas tentang anggaran untuk laporan kegiatan publik, dan pengaduan belum terlaksana. Bahkan penulis tidak melihat bahwa belum ada pengumuman dan layanan pengaduan. Ini aspek kemudahan akses informasi, dan kurangnya aspek-aspek ini dapat menghalangi Transparansi itu sendiri.

Dalam uraian latar belakang di atas, bagaimana masalah yang dapat diangkat dapat diselesaikan: **Transparansi Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

## **B. Rumusan Masalah**

Pada catatan latar belakang, ungkapan pertanyaan penelitian ini adalah "Apa yang menyebabkan adanya transparansi dalam laporan perencanaan dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk “menganalisis transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan kegiatan Biro Pembangunan dan Anggaran Setda Provinsi Sumatera Selatan”.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat diberikan dua macam manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang keilmuan bidang administrasi publik khususnya bidang keuangan nasional.

##### **2. Manfaat sebenarnya**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan tingkat keterbukaan informasi kepada publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bogdan. R.C., Biklen S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn and Bacon. Inc
- Christina Ellen. 2001. *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007. *Akuntansi Manajerial*. Edisi 11. Diterjemahkan oleh: Nuri Hinduan dan Edward Tanujaya. Salemba Empat. Jakarta
- Halim Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Hery. Tahun 2012 *Analisis Laporan Keuangan*. PT Bumi Aksara : Jakarta 13220
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Lalolo, Krina Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Ngusmanto 2015 *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media : Jakarta 2015
- Penny, Kusumastuti Lukito 2014 *Membumikan Trasnparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi
- Pedoman Perencanaan Kementrian keuangan.
- Singaribuan, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Umin Narimawati. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitati: Teori dan Aplikasi*: Bandung

### Peraturan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Peleaksanaan PeraturanPemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang PetunjukPenyusunan dan penyelahan Rencana Kerja dan Anggaran kementrian Negara/Lembagan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- Peraturan gubernur Nomor 1 Tahun 2016.
- Peraturan gubernur Nomor 71 Tahun 2016.
- Peraturan gubernur Nomor 72 Tahun 2016.
- Undang-undang No. 1 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang system Perencanaan pembangunan Nasional

### Sumber Lain

- <http://pdipm-lamongan.blogspot.co.id/2011/07/mekanisme-kerja-ipm.html> diakses tanggal 5 Agustus 2018)